SHARE: SOCIAL WORK JURNAL	VOLUME: 7	NOMOR: 1	HALAMAN: 1--129	ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 (*e*)

DEFINISI KEKERASAN TERHADAP ISTRI DI KALANGAN MAHASISWA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh:

BINAHAYATI RUSYIDI[1]

1. Departemen Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran

Email:

(titi.rusyidi06@gmail.com)

Abstract

Violence against wives is the most common form of violence against women reported in Indonesia. Understanding the definition of violence against wives is one of first steps to address the problem given that recognition about what constitutes violent behaviors has an influence on how society responds to victims and perpetrators.

The study described and examined factors associated with the attitudes of undergraduate social welfare students toward definitions of violence against wives using socio-demographic and socio-cultural perspectives. Samples were selected non-randomly using convenience sampling techniques. Data were collected through a self-administered survey taken by 294 students in the social welfare department of two separate universities located in the provinces of Yogyakarta and West Java late 2016. Data was analyzed using simple regressions techniques.

The study found that students generally reported stronger agreement to viewing physical violence as a form of violence against wives. On the contrary, they were less likely to view non-physical violence as violent behavior. Gender, attitudes toward gender roles, and type of university were found to be associated with attitudes toward the definition of violence against wives. Implications from the findings were discussed, taking into account the roles of educational institutions in shaping the students' attitudes.

Keywords: attitudes, social work college students, definitions violence against wives, socio-cultural factors, socio-demographic factors

Abstrak

Kekerasan terhadap istri merupakan bentuk paling umum dari tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di Indonesia. Pemahaman mengenai definisi kekerasan terhadap istri merupakan langkah pertama penanganan masalah karena pengakuan terhadap perilaku yang termasuk sebagai tindak kekerasan akan mempengaruhi bagaimana masyarakat merespon korban dan pelaku.

Studi ini ini mendeskripsikan dan menguji faktor-fakrot yang berasosiasi dengan sikap mahasiswa sarjana program studi kesejahteraan sosial mengenai definisi tindak kekerasan

terhadap istri berdasarkan perspektif sosial demografis dan sosial budaya. Pemilihan sampel dilakukan secara non-random menggunakan teknik convenience sampling. Data dikumpulkan melalui survey terhadap 294 mahasiswa kesejahteraan sosial dari 2 (dua) universitas di provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Barat yang dilaksanakan pada akhir tahun 2016. Analisa data dilakukan dengan teknik simple regression.

Studi menemukan bahwa para mahasiswa umumnya melaporkan persetujuan yang lebih besar untuk mengkategorikan kekerasan fisik sebagai bentuk kekerasan terhadap istri. Sebaliknya, mereka cenderung kurang memandang kekerasan non-fisik sebagai perilaku kekerasan. Gender, sikap terhadap peran jender, dan tipe universitas merupakan faktor signifikan yang berasosiasi dengan sikap terhadap tindak kekerasan terhadap istri. Implikasi dari temuan temuan studi ini didiskusikan dengan mengaitkan peran lembaga pendidikan dalam mempengaruhi sikap mahasiswa.

Kata kunci: sikap, mahasiswa keksejahteraan sosial, definisi kekerasan terhadap istri, faktor sosial-budaya, faktor sosial demografis

Pendahuluan

Kekerasan terhadap istri merupakan bentuk tindak kekerasan terhadap perepuan yang paling umum dan dilaporkan terjadi dalam semua masyarakat dengan berbagai latar belakang ekonomi, agama dan budaya (World Health Organization, 2016). Kekerasan terhadap istri merupakan perilaku yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis dan seksual terhadap korban.

Bentuk kekerasan terhadap istri bervariasi, meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi. Tiap bentuk kekerasan terhadap istri dapat berdiri sendiri atau terjadi bersamaan dalam satu waktu. Kekerasan fisik mencakup serangkaian tindakan yang menggunakan pemaksaan fisik yang dapat menimbulkan luka atau bahkan kematian korban seperti penggunaan senjata api, menempeleng, memukul, menendang, mencekik dan sebagainya. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual dan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya. Kekerasan psikologis merupakan penggunaan secara sengaja pesan-pesan verbal dan nonverbal serta komunikasi untuk menyebabkan kerugian mental atau emosional. Termasuk di dalamnya penghinaan atau ancaman yang terus-menerus serta berbagai bentuk perilaku mengontrol lainnya sepertimembatasi akses terhadap sumber-sumber finansial atau sosial, monitoring secara ketat mobilitas istri dan sebagainya (Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise and Watts, 2006; Ellsberg, Jansen, Heise, Watts, and Garcia-Moreno, 2008; World Health Organization, 2012). Kekerasan ekonomi merujuk pada control yang secara sengaja dilakukan pelaku atas keuangan dan sumber daya keluarga sehingga menghalangi perempuan untuk mendapatkan kemandirian finansial atau kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh penolakan suami untuk berkontribusi secara finansial untuk memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan dasar lain yang dibutuhkan oleh anggota keluarga (Fawole, 2008).

Badan Kesehatan Dunia (2012) mengakui bahwa kekerasan terhadap istri merupakan suatu fenomena global dan meminta keterlibatan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulanginya. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut termasuk melalui reformasi hukum, kampanye, pendidikan serta penyediaan layanan bagi korban dan pelaku. Namun demikian kekerasan terhadap istri terus menempati tangga puncak dalam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Kekerasan fisik merupakan bentuk yang paling sering dilaporkan, diikuti dengan kekerasan psikologis dan ekonomi (Komnas Perempuan, 2017).

Berbagai penelitian menunjukkan dampak negative kekerasan terhadap istri, bukan hanya terhadap korban tetapi juga keluarga dan masyarakat. Pemahaman mengenai sikap tentang definisi kekerasan terhadap istri merupakan langkah awal yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan menangani permasalahan. Berbagai studi menunjukkan bahwa sikap terhadap kekerasan terhadap istri berhubungan erat dengan praktik tindak kekerasan terhadap istri. Sikap terhadap tindak kekerasan terhadap istri juga mempengaruhi respon terhadap para korban, termasuk lembaga sosial penyedia layanan bagi korban dan lembaga penegakan hukum. Kegagalan korban untuk mengidentifikasi suatu perilaku sebagai tindak kekerasan dapat menghambat kemampuan mereka untu mengidentifikasi diri sebagai korban yang perlu mendpatkan bantuan (Petersen, Moracco, Goldstein, & Clark, 2005). Bersamaan dengan itu, ketidakresponan penyedia layanan kesehatan, sosial dan hokum serta masyarakat luas dalam memahami perilaku kekerasan terhadap istri dapat menghambat penyediaan layanan yang efektif bagi korban (Flood and Pease, 2009).

Penelitian ini menguji sikap mahasiswa kesejahteraan sosial mengenai definisi berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap istri oleh suami serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan perspektif sosial-demografis dan sosial budaya. Signifikansi penelitian ini didasarkan pada 3 (tiga) alasan. Pertama, lulusan kesejahteraan sosial memiliki peluang untuk terlibat dalam layanan penanganan kekerassan terhadap istri/perempuan, baik sebagai penyedi terapi, enyelenggara layanan, pekerja komunitas, peneliti atau penyusun kebijakan/program. Ketersediaan informasi mengenai sikap para mahasiswa dapat memberikan informasi bagi lembaga pendidikan untuk mempersiapkan para lulusan. Kedua, berbagai penelitian terkait definisi kekerasan terhadap perempuan telah dilakukan di berbagai negara, umumnya negara-negara non-Muslim seperti Amerika Serikat, Cina dan Israel (Nabors, Dietz, & Jasinski, 2006; Haj-Yahia & Schiff, 2007; Lin, Sun, Wu & Liu, 2016; Jiao, Sun, Farmer & Lin, 2016; Baldwin-White & Elias-Lambert, 2016). Literatur review yang dilakukan mengidentifikasi belum adanya studi serupa yang dilakukan di Indonesia atau yang secara khusus menyasar mahasiswa kesejahteraan sosial. Studi ini penting baik karena dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan mengenai sikap mahasiswa kesejahteraan sosial dalam konteks wilayah dan budaya yang berbeda dari studi-studi sebelumnya. Terakhir, studi-studi sebelumnya cenderung mengukur bentuk kekerasan yang terbatas, khususnya pada kekerasan fisik dan seksual dan dengan demikian mengabaikan bentuk penting lain dari kekerasan terhadap istri termasuk kekerasan emosional dan ekonomi yang dibahas dalam kajian ini (Lee, Busch-Armendaris, Kim and Lim, 2007; Lee, Kim and Lim; 2010).

Metode

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingat sarjana pada program kesejahteraan sosial pada sebuah universitas negeri di DI Yogykarta dan universitas swasta di Jawa Barat. Sampel diseleksi mengunakan convenience samping. Peneliti berkoordinasi dengn dosen pengampu mata kuliah untuk merekrut mahasiswa saat mereka mengikuti perkuliahan. Lembar kesediaan (informed consent) didistribusikan kepada mahasiswa dan jika bersedia maka mereka selanjutnya diberi kuesioner untuk diisi. Seluruh pengumpulan data dilakukan di akhir tahun 2016.

Variabel terikat dalam studi ini adalah definisi tentang kekerasan terhadap istri di kalangan mahasiswa. Skala Definisi Kekerasan terhadap Istri digunakan untuk mengukur sikap (persetujuan atau penolakan) mahasiswa untuk mengkategorikan perilaku-perilaku tertentu yang merupakan kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, seksual dan kontrol sosial oleh suai terhadap istri merupakan kekeraan terhadap istri. Skala terdiri atas 13 pernyataan diukur dengn menggunakan 5-poin skala Likert dimana 1=sangat tidak setuju, 3=netrl, dan 5=sangat setuju. Total skor tertinggi adalah 65 dan teredah adalah 13. Semakin tinggi skor yang dilaporkan berarti semakin tinggi persetujuan untuk mengkategorikan berbagai bentuk tindak kekerasan sebagai kekerasan terhadap istri, dan sebaliknya. Cronbach alpha Skala adalah .82, menunjukkan internal konsistensi yang baik.

Variabel terikat dalam studi ini meliputi 4 variabel sosial demografis yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan tertinggi ubu serta tingkat pendidikan tertinggi ayah. Variabel sosial budaya terdiri atas 3 yaitu jenis universitas, sikap terhadap peran ender dan tingkat keberagamaan. Walaupun etnisitas dan agama merupakan variable sosial budaya yang digali dalam kajian ini, keduanya tidak diuji karena sekitar 90% of partisipan berasal dari suku Jawa dan Sunda atau beragama Islam.

Instrumen untuk mengukur faktor-faktor sosial budaya menggunakan 2 instrumen terstandar yaitu Attitudes Toward Women Scale-short version (Spence, Helmreich, 1978) dan Religiosity Scale (Haj-Yahia, 1998). Short version of the Attitudes Toward Women Scale (ATWS) terdiri atas 15 pernyataan untuk menggali sikap individu terhadap hak-hak, peran-peran dan kewajiban-kewajiban perempuan dalam masyarakat modern menggunakan 4 skala Likert di mana 1= sangat tidak setuju dan 4= sangat setuju. Semakin tinggi total skor berarti individu semakin mendukung laki-laki dan perempuan dan sebaiknya (Helmreich, Spence, & Gibson, 1982). Haj-Yahia Religiosity Scale digunakan untuk mengukur tingkat keberagamaan individu menggunakan 3 pernyataan dalam 6 skala Likert di mana 1= tidak sama sekali dan 6=sangat tinggi. Semakin tinggi total skor berarti semakin tinggi tingkat keberagamaan yang dilaporkan responden dan sebaliknya.

Berbagai analisa statistikc deskriptif diterapkan untuk menggambarkan karakteristik sosial demografis dan sosial budaya partisipan. Jenis kelamin dan tipe universitas dipandang sebagai variable kategorikal (0 dan 1) sementara berbagai variable bebas lainnya diperlakukan sebagai continuous variables.

Hasil

Tabel 1 di bawah ini menggambarkan profil umum para partisipan. Total 294 mahasiswa program sarjana Kesejahteraan Sosial berpartisipasi dalam studi, terdiri atas 53.5 persen (156) dari universitas di Yogyakarta dan 46.5 persen (138) berasal dari universitas di Jwa Barat. Usia rata-rata partisipan adalah 19.2 tahun. Sekitar 52 persen partisipan adalah perempuan dan sisanya laki-laki. Partisipan adalah mahasiswa dari berbagai angkatan namun lebih dari 95% dari mereka adalah mahasiswa tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 3.

Tingkat pendidikan tertinggi ayah partisipan cukup beragam namun mayoritas merupakan lulusan SLTA (49.7%). Kondisi yang sama juga ditemukan pada tingkat pendidikan tertinggi ibu di mana 43.7% merupakan lulusan SLTA. Tingkat keberagamaan yang dilaporkan mahasiswa rata-rata berada pada rentang menengah (17.27), demikian pula halnya dengan sikap terhadap peran jender (36.7).

Tabel 2 menggambarkan frekuensi definisi mahasiswa terhadap tindak kekerasan oleh suami terhadap istri. Pada prinsipnya, mahasiswa cenderung melaporkan persetujuannya bahwa yang dipandang tindak kekerasan identic dengan kekerasan fisik. Ini artinya mereka cenderung kurang memandang bentuk-bentuk kekerasan non-fisik seperti kekerasn emosional atau perilaku mengontrol /membatasi sebagai tindak kekerasan. Misalnya, 90% (M=4.50) setuju bahwa melempar istri dengan benda keras adalah tindak kekerasan.Selanjutnya, 84.8% dan 86% dari mereka setuju atau sangat setuju bahwa tindakan mengancam melukai istri dengan menggunakan benda tajam dan menempeleng istri merupakan tindakan kekerasan (M=4.22, M=4.27).

Sebaliknya, hanya sebagian kecil dari mahasiswa yang melaporkan persetujuan bahwa perilaku-perilaku yang bersifat mengontrol atau bentuk-bentuk perilaku kekerasan non-fisik lainnya sebagai bentuk kekerasan suami terhadap istri. Misalnya, kurang dari 11% (M=2.23) dan 15% setuju bahwa menuntut istri memberitahu ke mana saja ia pergi setiap waktu dan melarang istri bekerja atau melanjutkan pendidikan tanpa alsan yang jelas merupakan bentuk perilaku mengontrol yang dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan. Selanjutnya, hanya sekitar 12% dan 19% partisipan setuju bahwa suami mengontrol penuh asset keluarga(M=2.54) dan suami melarang istri terlibat dalam pengambilan keputusan apapun (M=2.63) sebagai tindak kekerasan oleh suami terhadap istri.

Tabel 1. Frekuensi mahasiswa berdasarkan profil sosial demografis dan sosial budaya

Variabel	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Angkatan		
Sebelum 2014	6	2.1
2014	71	25.0
2015	97	34.2
2016	110	38.7
Pendidikan tertinggi ayah		
SD atau di bawhnya	38	13.3
SLTP	205	7.0
SLTA	142	49.7
Diploma	22	7.9
Sarjana	48	16.8
Pascasarjana	15	5.2
Pendidikan tertinggi ibu		
SD atau di bawhnya	52	18.3
SLTP	25	8.8
SLTA	124	43.7
Diploma	19	6.7
Sarjana	61	21.5
Pascasarjana	3	1.1

Tabel 2. Frekuensi Partisipan Tentang Definisi Kekerasan Terhadap Istri

To what extent do you agree the following husband's acts against wife as violent behavior	**Mean**	**SD**	**STS**	**TS**	**N**	**S**	**SS**
Menempeleng	4.27	.96	3.1	3.1	7.6	36.0	50.2
Ancaman membunuh dengan benda tajam	4.22	1 .05	4.5	4.2	6.6	34.3	50.5
Sering mengancam menceraikan	3.16	1.05	5.9	20.8	35.3	28.0	10.0
Sering memaki atau berkata kasar	3.67	.96	1.4	12.8	21.1	46.7	18.6
Melempar benda keras	4.50	1.06	2.1	1.1	5.5	27.7	62.3
Menolak menafkahi istri	3.68	1.12	4.6	12.3	18.9	38.6	25.6
Membatasi sosialisasi dengan keluarga dan teman	2.99	1.11	6.9	29.1	33.6	18.7	11.8

Memaksa berhubungan intim	2.82	1.23	18.0	21.1	29.4	20.8	9.7
Melarang bekerja atau melanjutkan pendidikan tana alasan jelas	2.53	1.03	14.9	36.8	33.7	9.4	5.2
Kontrol penuh atas asset keluarga	2.54	.95	11.5	39.5	35	.7	10.1
Setiap saat menuntut tahu ke mana pergi dan dengan siapa istri pergi	2.23	.95	22.1	45.0	22.1	9.0	1.7
Melarang istri terlibat dalam pengambilan keputusan	2.63	1.01	10.4	40.8	29.4	14.5	4.8
Memaksa hubungan seks dengan cara atau di tempat yang tidak seharusnya	2.63	1.01	3.5	12.1	22.8	36.3	25.3

SD= Standard Deviation; STS= Sangat Tidak Setuju; TS=Tidak Setuju; N=Netral; S=Setuju; SS=Sangat Setuju

Tabel 3 menunjukkan hasil analisa regresi. Tiga variable ditemukan memiliki asosiasi yang signifikan dengan sikap terhadap definisi tindak kekerasan yaitu universitas, jenis kelamin, dan sikap terhadap peran jender. Definisi tindak kekerasan terhadap istri yang dilaporkan mahasiswa Kesejahteraan Sosial dari universitas di Yogyakarta secara signifikan lebih luas dibandingkan dengan rekan-rekannya di Jawa Barat ($p<.001$). Mahasiswa perempuan secara signifikan memiliki definisi yang lebih luas tentang tindak kekerasan terhadap istri dibandingkan dengan rekan-rekan mahasiswa laki-laki ($p<.050$). Selanjutnya, semakin tinggi persetujuan terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan yang dilaporkan mahasiswa, maka mereka akan semakin cenderung untuk mendefinisikan tindak kekerasan terhadap istri secara lebih luas ($p<.050$). Variabel-variabel lainnya seperti tingkat pendidikan orangtua, tingkat keberagamaan dan usia tidak ditemukan berasosiasi signifikan terhadap definisi tindak kekerasan terhadap istri.

Tabel 3. Regresi Definisi Tindak Kekerasan Terhadap Istri Berdasarkan Karakteristik Sosial Demografis dan Sosial Budaya Mahasiswa Kesejahteraan Sosial (*N=294)*

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2193.229	1170.398		1.874	.062
	Comparison UIN & UNPAS	3.385	.848	.243	3.992	.000***
	Year starting the study	-1.076	.578	-.138	-1.862	.064
	Sex categorical	1.866	.881	.134	2.118	.035*
	Respondent's age	.443	.464	.072	.955	.340
	Father education level	.492	.373	.096	1.320	.188
	Mother education level	-.325	.355	-.064	-.918	.360
	Total religiosity	-.046	.134	-.019	-.341	.733
	ATWS Total	.164	.065	.161	2.524	.012*
a. Dependent Variable: Definition Violence Against Wives						

PEMBAHASAN

Kajian ini mengungkapkan beberapa temuan utama yang sejalan dengan temuan penelitian-pnelitian sebelumnya. Pertama, terdapat kecenderungan umum untuk mempersempit pendefinisian tindak kekerasan terhadap istri sebagai tindak kekerasan fisik. Sebaliknya, berbagai bentuk tindak kekerasan non-fisik tidak dipandang sebagai tindak kekerasan. Kecenderungan ini juga ditemukan pada kajian-kajian di luar Indonesia. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Nabors dkk. (2006) di kalangan mahasiswa perguruan tinggi di Amerika Serikat , mengungkapkan bahwa mahasiswa cenderung melaporkan persetujuan yang lebih tinggi untuk mengkategorikan agresi fisik sebagai tindak kekerasan . Pola yang sama juga ditemukan dalam studi di Hong Kong (Tang, Wong, Cheung and Lee, 2000).

Kecenderungan di atas tampaknya terkait dengan persepsi bahwa kekerasan non-fisik menimbulkan dampak yang tidak langsung atau tidak menimbulkan luka fisik terhadap korban, sehingga kurang dipandang sebagai tindak kekerasan. Dalam kenyataannya, berbagai studi menunjukkan bahwa bentuk kekerasan non-fisik lebih sering dialami oleh para korban dan berbagai bentuk tindak kekerasan non-fisik merupakan faktor resiko untuk terjadinya tindak kekerasan fisik yang membahayakan. Selanjutnya, berbagai studi telah mengkonfirmasi bahwa dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan non-fisik sama negatifnya dengan dampak yang ditimbukan oleh kekerasan fisik (Antai, 2011). Pengabaian kekerasan non-fisik dalam pendefinisian tindak kekerasan terhadap istri tidak saja menunjukkan pengabaian terhadap pengalaman korban tetapi juga mengabaikan potensi dampak negative yang ditimbulkannya.

Walaupun responden umumnya kurang menganggap kekerasan non-fisik sebagai tindak kekerasan, mereka cukup berbeda dalam menilai bentuk-bentuk kekerasan non-fisik tersebut. Responden umumnya lebih cenderung setuju bahwa perilaku suami yang menolak menafkahi istri dan kekerasan verbal terhadap istri sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dibandingkan dengan bentuk-bentuk tindak kekerasan psikologis lainnya. Pemahaman ini kemungkinan besar terkait dengan pengaruh agama dan budaya yang menegaskan pentingnya saling menghormati dalam perkawinan dan pentingnya peran suami sebagai pemberi nafkah bagi keluarganya. Penyimpangan dari standar tersebut dianggap sebagai tidak pantas dan dapat merugikan atau melanggar hak pihak lain/istri. Menariknya, dominasi suami dalam pengambilan keputusan, pembatasan mobilitas istri dan pemaksaan hubungan seksual cenderung kurang dipandang sebagi bentuk kekerasan dibandingkan dengan beberapa betuk kekerasan psikologis lainnya. Tampaknya para responden mahasiswa cenderung memandang bahwa sebagai kepala keluaga, seorang suami memiliki lebih banyak hak dalam pengambilan keputusan dan mengatur mobilitas istri, Selanjutnya, banyak responden mahasiswa tidak memandang pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan sebgai tindak kekerasan karena suami dipandang memiliki akses dominan terhadap istri sehingga persetujuan istri dalam melakukan hubungan seksual dipandang tidak penting. Di lain sisi, norma sosial yang berlaku umumnya mengajarkan bahwa kewajiban istri untuk melayani suamiya, termasuk dalam hubungan seks, sehingga istri tidak boleh menolak (Hakimi, Hayati, Marlinawati, and Ellsberg, 2001; Rusyidi, 2011).

Penelitian ini juga memvalidasi pengaruh jenis kelamin terhadap sikap dalam mendefinisikan tindak kekerasan terhadap istri seperti yang telah ditemukan di berbagai penelitian lintas budaya sebelumnya. Perempuan cenderung mendefinisikan tindak kekerasan seksual secara lebih luas dibandingkan dengan rekan laki-laki (Nayak, Bryne, Martin, and Abraham, 2003; Nabors et al., 2006; Lin et al., 2016;). Hal ini mungkin karena perempuan lebih menyadari bahwa tindk kekerasan umumnya menjadikan perempuan sebagai korban sehingga membuat mereka lebih sensitive dalam menyikapi setiap bentuk tindak kekerasan.

Asosiasi antara sikap terhadap peran jender dan sikap terhadap definisi tindak kekerasan terhadap perepuan yang ditemukan dalam kajian ini juga konsisten dengan temuan di berbagai penelitian di kalangan mahasiswa yang dilakukan sebelumnya di berbagai negara seperti Amerika Serikat (Nabors & Jasinski, 2009); China, Hong Kong dan Taiwan (Jiao et al., 2016). Individu yang tidak mendukung kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat cenderung mendefinisikan tindak kekerasan terhadap istri secara sempit. Sebaliknya, mereka yang mendukung kesetaraan gender akan cenderung mendefinisikan tindak kekerasan secara lebih luas. Mereka yang cenderung mendukung pembagian peran jender konservatif cenderung memandang jender sebagai basis pembagian peran dalam keluarga dan masyarakat. Mereka juga cenderung memadang laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam memegang kendali sehingga cenderung tidak memandang bentuk kontrol atau subordinasi perempuan sebagai entuk kekerasan..

Penelitian juga menemukan fakta menarik bahwa tipe universitas berasosiasi secara signifikan dengan sikap mahasiswa. Mahasiswa dari sebuah universitas negeri di Yogyakarta mendefinisikan tindak kekerasan secara lebih luas dibandingkan rekan-rekannya yang beraal dari perguruan tinggi swasta di Jawa Barat. Kajian lanjutan perlu dilakukan untuk menjelaskan

perbedaan tersebut. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh tim peneliti, tampaknya mahasiswa di Yogyakarta lebih banyak terekspos dengan pemikiran-pemikiran kritis tentang hak-hak asasi manusia dan kesetaraan jender melalui kegiatan kelas dan ekstra kurikuler di lingkungan kampus dibandingkan teman-temannya di Jawa Barat. Keterpaparan tersebut mungkin meningkatkan sensitivitas mahasiswa terhadap isu-isu ketidakadilan jender yang salah satunya termanifestasi dalam berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan..

Simpulan dan Rekomendasi

Temuan dalam penelitian ini menegaskan pentingnya meningkatkan pemahaman mahasiswa kesejahteraan sosial mengenai perilku-perilaku tindak kekerasan terhadap istri. Pemahaman yang luas mengenai konsep kekerasan dan bentuk kekerasan terhadap istri akan membantu mereka dalam memahami signifikansi masalah. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong mahasiswa untuk membekali diri dengan kompetensi –kompetensi yang dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat, memobilisasi sumber daya yang lebih besar untuk menangani permasalahan serta mengadvokasi kebijakan sosial yang lebih komprehensif untuk mengurangi permasalahan kekerasan terhadap istri.

Upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai definisi tindak kekerasan mungkin dapat difokuskan pada kelompok mahasiswa laki-laki mengingat bahwa mereka cederung memiliki pemahaman yang lebih sempit tentang tindak kekerasan terhadap istri disbanding mahasiswa perempuan. Selanjutnya, peningkatan pemahaman mahasiswa dapat dilakukan bersama-sama dengan upaya meningkatkan pemahaman tentang kesadaran jender. Hal ini dapat dilakukan dalam materi-materi pengajaran yang meliputi bahan ajar tentang hak asasi manusia dan kesetaraan jender atau mata kuliah agama, khususnya perlindungan hak perempuan dalam perspektif agama, salah satunya Islam. Selain itu, mahasiswa juga perlu didorong untuk terlibat dalam kerja praktek di organisasi-organisasi yang bergerak di bidang layanan pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga atau pemberdayaan perempuan.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengakuan terhadap apa yang yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan suami terhadap istri masih sangat bervariasi, tergantung dari lembaga pendidikan di mana mahasiswa menuntut ilmu di mana mahasiswa di satu universitas melaporkan sikap yang lebih positif dibandingkan lainnya. Hal ini menegaskan pentingnya upaya Ikatan Pendidikan Pekerja Sosia Indonesia untuk mengkaji ulang standar kurikulum pendidikan pekerjaan sosial dan implementasinya. Integrasi isu jender dan keadilan sosial dipandang mendesak untuk kurikulum tingkat nasional.

Di masa yang akan datang, perlu dilakukan ajian dengan sampel yang lebih luas, termasuk menyasar mahasiswa program studi kesejahteraan sosial yang ada di luar pulau Jawa. Studi yang membandingkan sikap mahsiswa kesejahteraan sosial Indonesia dengan mahasiswa kesejahteraan sosial di negara lain tampaknya juga perlu dilakukan mengingat besarnya pengaruh sosial budaya dalam mebentuk pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap isu-isu keadilan jender.

Referensi

Antai, D. (2011). Controlling behavior, power relations within intimate relationships and intimate partner physical and sexual violence

against women in Nigeria. BMC Public Health, 11, 511-522.

Baldwin-White, A. & Elias-Lambert, N. (2016). Rape myth acceptance among social work students. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 25 (7), 702-720.

Ellsberg M. C., Jansen H., Heise L., Watts C. H., & Garcia-Moreno C. (2008). Intimate partner violence and women's physical and mental health in the WHO multi-country study on women's health and domestic violence: An observational study. The Lancet, 371, 1165-1172. doi:10.1016/s0140-6736(08)60522

Garcia-Moreno C., Jansen H., Ellsberg M., Heise L., & Watts, C. H. (2006). Prevalence of intimate partner violence: Findings from the WHO multi-country study on women's health and domestic violence. The Lancet, 368, 1260-1269.

Fawole, O.I. (2008). Economic violence to women and girls. Is it receiving the necessary attention?. Trauma, Violence & Abuse, 9 (3), 167-177.

Flood, M. & Pease, B. (2009). Factors influencing attitudes to violence against women. Trauma, Violence & Abuse, 10 (2), 125-142.

Goldblatt, H. (2009). Caring for abused women: impact on nurses' professionals and personal life experiences. Journal of Advanced Nursing 65 (81), 1645-1654.

Haj-Yahia, M.M. (1998). Beliefs about wife beating among Palestinian women: The Influence of their patriarchal ideology. Violence Against Women, 4, 533-558.

Haj-Yahia, M.M. & Schiff, M. (2007). Definitions of and beliefs about wife abuse among undergraduate students of social work. International Journal of Offender Therapy & Comparative Criminology, 51, 170-189.

Hakimi, M., Hayati, E.E., Marlinawati, V.U., and Ellsberg, M.C.. (2001). (Ed.). Silence for the sake of harmony: Domestic violence and women's health in Central Java, Indonesia. Yogyakarta, Indonesia: CHN-RL GMU.

Hayati, E.N., Hogberg, U., Hakimi, M., Ellsberg, M.C., & Emmelin, M. (2011). Behind the silence of harmony: Risk factor for physical and sexual violence among women in rural Indonesia. BMC Women's Health, 11.

Helmreich, R. L., Spence, J. T., & Gibson, R. H. (1982). Sex role attitudes 1972-1980. Personality and Social Psychology, 37, 1631-1644.

Jiao, Y., Sun, I.Y., Farmer, A.K., & Lin, K. (2016). College students' definitions of intimate partner violence: A Comparative study of three Chinese societies. Journal of Interpersonal Violence, 31 (7), 1208-1229.

Kelly, J.B. (2008). Differentiation among types of intimate partner violence: Research update and interpretations for interventions. Family Court Review, 46 (3), 476-499.

Komnas Perempuan. (2013). Kekerasan Seksual. Downloaded from o 17 October 2016 from http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf on 17 Oktober 2016.

Komnas Perempuan. Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016 – 7 Maret 2016. Downloded on 20 October

2016 from http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016/

Lee, J., Busch-Armendaris, N.B., Kim, J.& Lim, H. (2007). Attitudes toward date rape among university students in South Korea. Sex Roles, 57 (9), 641-649.

Lee, J., Kim, J., & Lim, H. (2010). Rape myth acceptance among Korean college students: The Roles of gender, attitudes toward women and sexual double standard. Journal of Interpersonal Violence, 25 (7), 1200-1223.

Lee, J., Lee, C., Lee, W. (2012). Attitudes toward women, rape myths, and rape perceptions among male police officers in South Korea. Psychology of Women Quarterly, 36(3), 365-376.

Lin, K., Sun, I.Y., Wu, Y. & Liu, J. (2016). College students' attitudes toward intimate partner violence: A Comparative study of Chinese and the United States. Journal of Family Violence, 31: 179-189.

Nabors, E.L., Dietz, T.L., & Jasinski, J. (2006). Domestic violence beliefs and perceptions among college students. Violence and Victims, 21 (6), 779-795.

Nayak, M., C. Byrne, M. Martin, and A. Abraham (2003) Attitudes towards violence against women: A cross-nation study. Sex Roles, 49(7/8), pp. 333-342.

Petersen, R., Moracco, K.E., Goldstein, K.M., & Clark, K.A. (2004). Moving beyond disclosure: women's perspectives on barriers and motivators to seeking assistance for intimate partner violence. Women Health, 40 (3), 63-76.

Rusyidi, B. (2011). Attitudes toward violence against wives in West Java, Indonesia. Unpublished Dissertation. School of Social Welfare, State University of New York: Albany, New York, USA.

Steinmetz, S., & Haj-Yahia, M. M. (2006). Definitions of and beliefs about wife abuse among ultra-Orthodox Jewish men from Israel. Journal of Interpersonal Violence, 21, 525-554.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.

Tang, C.S., Wong, D., Cheung, M.C., & Lee, A. (2000). Exploring how Chinese define violence against women: A Focus group study in Hong Kong. Women's Studies International Forum, 23 (2), 197-209.

Yllo, K. A., & Straus, M. A. (1990). Patriarchy and violence against wives: The impact of structural and normative factors. In M. A. Straus &R. J. Gelles (Eds.), Physical violence in American families: Risk factors and adaptations to violence in 8,145 families (pp. 383–399). New Brunswick, NJ: Transaction.

World Health Organization. (2012). Understanding and addressing violence against women. Downloaded on 20 October 2016 from 2016http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77432/1/WHO_RHR_12.36_eng.pdf

World Health Organization. 2016. Fact Sheets. Intimate partner and sexual violence against women.